

**FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN INDIA MENERAPKAN PRINSIP
CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) (STUDI KASUS:
DISKRIMINASI PEREMPUAN KASTA DALIT)**

Oleh: Shirley Dwi Gayatri

Email: shirley.dwi1779@student.unri.ac.id

Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru,
28294, Telp/Fax (0761) 632277

ABSTRACT

This research analyzes the factors in India's failure to apply the principles of CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). The case study taken is discrimination against Dalit caste women in India. This research will look at the factors of India's failure in adopting the CEDAW convention policy in India's national policy which is oriented towards the goal of gender equality and the elimination of all forms of discrimination. Cases of discrimination against Dalit women have been going on for a long time but this practice is still continuing. Dalit women experience caste and gender discrimination simultaneously. Discriminatory practices against Dalit caste women in India clearly violate CEDAW principles.

This research uses a qualitative method with data collection techniques, researchers use secondary data with document analysis data collection techniques referring to books, journals and internet sites. The state as the level of analysis and supported by regime effectiveness theory as a basic research reference.

The results shows that India has failed to fulfill its obligation in applying CEDAW principles. The practice of discrimination that continues until now is proof of this failure, the number of discriminations against Dalit Women on average increases every year. In implementing CEDAW principles, India has used various instruments which include public policies in the form of regulations, sanctions, and capacity building through education and government programs. Government efforts have not had a significant impact.. India's failure to apply CEDAW principles is caused by several factors, namely social factors, cultural factors, economic factors, and justice factors.

Keywords: Discrimination, Dalit, Caste, CEDAW, Women, India

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti sekarang, banyak isu-isu menarik perhatian masyarakat dunia. Salah satunya adalah isu hubungan internasional mengenai diskriminasi dan kesetaraan gender. Permasalahan ini tentu menjadi tantangan perempuan menjadi permasalahan yang serius terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara historis, kehidupan sipil, sosial, politik, dan ekonomi di India telah dipengaruhi oleh sistem kasta, yaitu sistem stratifikasi sosial dalam bentuk pengelompokan masyarakat secara hierarkis yang ditentukan oleh keturunan atau pekerjaan tertentu.¹ Dalam bentuk esensial, sistem kasta bersifat kaku dan membentuk batasan-batasan hak pada individu yang telah melekat menjadi identitasnya sejak lahir sehingga memicu timbulnya diskriminasi.

India merupakan negara Asia yang menganut sistem sosial yang mengakui empat kasta, yaitu brahmana, ksatria, waisya dan sudra. Diluar empat hierarki tersebut ada kelompok yang disebut sebagai 'untouchable', Dalit, yang berarti miskin atau 'oppressed'², yang merupakan bagian terluar dari hirarki kasta di India. Selama 3000 tahun sejak 1500 SM Dalit mendapatkan penindasan dan dianggap sebagai polusi bagi orang kasta atas, sehingga rasa kehilangan identitas diri sebagai manusia seutuhnya. Terdapat ±260 juta atau 30% dari total populasi India yang

tergolong dalam kelompok Dalit.³ Diskriminasi atas kelompok yang terpengaruh oleh kasta dalam masyarakat, ketidaksetaraan dalam hubungan sosial ini menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan diantara kelompok kasta lain. Data menunjukkan tingkat kemiskinan kelompok Dalit sebanyak 65,8% hampir dua kali lipat dibandingkan penduduk lainnya yaitu 33.3%.

Kelompok Dalit terbiasa melakukan pekerjaan yang kotor, kasar dan berbahaya seperti budak, buruh serabutan, dan membersihkan kotoran.⁴ Kelompok Dalit terus terikat dalam lingkaran kemiskinan karena posisi ekonomi yang lemah dan kurangnya akses sumber daya yang meningkatkan ketergantungan Dalit pada pekerja upahan. Ini adalah akibat dari keterbatasan jenis pekerjaan, kesenjangan dan pencapaian Pendidikan.⁵ Pekerjaan yang dilakukan kelompok Dalit menambahkan stigmatisasi yang harus dihadapi dari masyarakat berupa pengucilan dan ketidaksetaraan dalam hubungan sosial nasib kelompok ini dikatakan sebagai *modern humanitarian crisis* yang kini disebut '*hidden apartheid*'.

Dalam kelompok Dalit masih ada kelompok yang lebih tertindas

¹ Human Rights Watch. 2001. Caste Diskrimination : A Global Concern.

² Ghanshyam Shah. 2006. "Untouchability in Rural India. New Delhi; Thousand Oaks" p.13

³ Census of India. 2011. Provisional Population Totals. Paper 2, Volume 1 of 2011. http://censusindia.gov.in/2011-provresults/paper2/data_files/india/paper2.

Diakses 29 Oktober 2022

⁴ Ghanshyam Shah. 2006. "Untouchability in Rural India. New Delhi; Thousand Oaks"

⁵ IDSN. 2014b. URGENT APPEAL: Reprisals against IDSN by the Government of India in trying to formalize its association with the UN and obtain ECOSOC Status..

[http://idsn.org/wp-content/uploads/pdfs/Urgent_Appeal/Urgent_Appeal - IDSN - October 2014.pdf](http://idsn.org/wp-content/uploads/pdfs/Urgent_Appeal/Urgent_Appeal_IDSN_October_2014.pdf)

diakses 30 Oktober 2022.

yaitu perempuan Dalit. Perempuan Dalit mengalami diskriminasi yang bersumber dari ketidaksetaraan gender dan diskriminasi kasta. Sebagai bagian dari kasta rendah sekaligus kelompok minoritas di India, perempuan Dalit menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan perempuan non-Dalit maupun masyarakat India pada umumnya. Secara lebih spesifik, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Dalit, diantaranya adalah kerugian ekonomi, kerugian pendidikan, angka kesehatan yang buruk, diskriminasi atas dasar kasta dalam mengakses sumber kehidupan, layanan publik dan partisipasi politik, kekerasan berbasis kasta, prostitusi kuil (eksploitasi seksual atas nama agama).⁶ Dalam *Dalit Woman for Justice Status Report 2021* menyebutkan 51% anak Dalit putus sekolah dasar dan jumlahnya naik menjadi 67% di kalangan anak perempuan, terjadi penurunan yang signifikan dalam tingkat pendaftaran anak perempuan Dalit, dari 99% di Sekolah Dasar menurun menjadi 15.6% di pendidikan tinggi.

Akses sumber kehidupan perempuan Dalit yang bekerja sebagai wiraswasta adalah yang paling rendah dari kelompok lainnya, hanya 37,7% perempuan Dalit yang bekerja sebagai wiraswasta dibandingkan dengan kasta dominan yaitu 55%, dari semua total buruh lepas perempuan, yang paling banyak adalah perempuan

⁶ Nindhi Sadana Sabharwal dan Wandana Sonalkar, "Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste", <http://www.theglobaljusticenetwork.org/global2441/index.php/gjn/article/download/54/85> diakses pada 15 Mei 2022

Dalit. Kasus kekerasan terhadap perempuan Dalit tercatat pada tahun 2014 dengan angka 12.77% (5.149 kasus) dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 16.35% (7.510 kasus).⁷ Berangkat dari keadaan tersebut, dunia internasional pun mulai memberi perhatian lebih terhadap hak asasi wanita. Salah satunya dengan diadakannya konvensi internasional pertama yang berkenaan dengan kaum wanita.

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan dari Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*) yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yaitu konvensi internasional yang ditetapkan oleh PBB yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dengan meyakinkan sebanyak mungkin negara dalam menerima prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. India merupakan salah satu dari banyak negara yang meratifikasi CEDAW tepatnya ditandatangani pada 30 Juli 1980 dan diratifikasi pada 9 Juli 1993 dengan membuat deklarasi mengenai konvensi ini. CEDAW melalui pasal 2 menyebutkan bahwa negara peserta harus mengupayakan dalam membuat dan menerapkan peraturan perundangan terkait dengan penghapusan tindakan-tindakan yang dianggap menimbulkan perlakuan diskriminasi sebagai upaya dalam melindungi hak asasi perempuan. Pasal 5a yang terdapat di dalam CEDAW kemudian memperjelas bahwa negara peserta perlu untuk mengubah pola perilaku

⁷ AIDMAM. 2021. *Dalit Woman Rise For Justice: Status Report 2021*. P.46

sosial dan budaya yang bersifat diskriminasi pada salah satu gender. India menempati urutan pertama sebagai negara yang paling berbahaya bagi perempuan karena praktik kebudayaannya.⁸ Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan utama yang belum dapat diselesaikan oleh India. Praktik diskriminasi terhadap perempuan kasta Dalit di India tersebut secara jelas mencederai prinsip-prinsip CEDAW. Walaupun pada perkembangannya pemerintah India sudah mulai menandai dan menyusun aturan-aturan serta meratifikasi perjanjian internasional dalam rangka melindungi hak-hak perempuan Dalit, pada penerapannya undang-undang maupun hukum yang ditetapkan pemerintah berbanding terbalik dengan upaya tersebut. Hukum yang ada malah dijadikan sebagai cara untuk menekan hak-hak sipil perempuan dan masyarakat Dalit secara keseluruhan.

Diperlukan upaya yang lebih efektif untuk mendorong proses penerapan hukum yang jelas dan adil terhadap perempuan Dalit di India serta memastikan hak-hak sebagai warga negara. Peranan rezim internasional sangat dibutuhkan untuk mendisiplinkan India agar bertindak sesuai dengan standar serta norma internasional mengingat negara ini merupakan penandatanganan dari berbagai perjanjian HAM internasional. Dibutuhkan keterlibatan, peranan serta upaya dari berbagai organisasi nonpemerintah lokal dan global

⁸ Belinda Goldsmith, Meka Beresford. "India Most Dangerous Country For Women With Sexual Violence Rife _ Global Poll" <https://www.reuters.com/article/women-dangerous-poll-idINKBN1JM076> diakses pada 10 Mei 2022

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya isu ini.

KERANGKA TEORI

Tingkat Analisa: Negara

Pada level analisis ini, penjelasan tentang perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke⁹, yang diperlukan ketika seorang peneliti menggunakan level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Tingkat analisis negara akan menghasilkan penjelasan yang tidak terlalu makro seperti yang dihasilkan pada tingkat analisis sistem, tidak pula terlalu mikro seperti ketika menggunakan level analisis individu.¹⁰

Teori Efektivitas Rezim

Arild Underdal berpandangan bahwa efektivitas rezim berkaitan erat dengan bentuk kesuksesan rezim. Tingkat kesuksesan ditakar dari upaya menjalin hubungan kerja sama serta pelaksanaan rezim yang sesuai dengan peranannya dalam mengatasi permasalahan yang memicu kelahiran rezim tersebut.¹¹ Perilaku aktor-aktor yang terikat dengan rezim mampu merefleksikan implementasi rezim tersebut. Skala keberhasilan atau kegagalan rezim bisa dinilai melalui pelaksanaan fungsi dan wujud implementasi

⁹ John T Rourke. *International Politics on the World Stage, 5th ed.*, (Connecticut: Dushking Publishing Group, 1995)

¹⁰ Yessi Olivia. 2013. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional*. Vol 5. No. 1

¹¹ Arild Underdal, 1987, *Explaining Regime Effectiveness*, Press Universitas hlm.3-45

rezim terhadap permasalahan yang sedang atau telah dihadapi. Analisis penelitian Underdal menyatakan efektivitas rezim merupakan bentuk variabel yang bersifat dependen. Variabel independen yang berpengaruh terhadap efektivitas rezim berupa tipe permasalahan dan kapasitas aktor. Tipe permasalahan adalah beraneka ragam hambatan/persoalan yang dijumpai oleh rezim. Kapasitas aktor adalah kemampuan untuk menghadapi dan membereskan permasalahan yang dimiliki aktor dalam rezim. Variabel independen mampu dijabarkan dengan menggunakan tiga komponen utama, yakni *level of collaboration* (Tingkat kolaborasi), *problem malignancy* (kerumitan permasalahan) dan *problem solving capacity* (kapasitas penyelesaian masalah). Variabel tipe permasalahan dianalisa dengan memakai komponen kerumitan masalah, sedangkan variabel kapasitas aktor dianalisa dengan menggunakan komponen tingkat kolaborasi dan kapasitas penyelesaian masalah.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplor dan memahami makna yang bagi individu maupun kelompok dianggap sebagai penyebab dari permasalahan sosial atau kemanusiaan.¹² Metode penelitian kualitatif bersandar pada teks dan data gambar dan memiliki langkah-langkah khusus dalam menganalisis data.

¹² John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition* (California, SAGE Publications: 2013), 4.

Peneliti menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data analisis dokumen. Teknik analisis dokumen yaitu pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis. Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber data tertulis. Selanjutnya sumber tertulis itu dilakukan pembacaan dengan seksama lalu dipilih tuturan yang relevan sebagai data yang dianalisis.

PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Konvensi CEDAW

India menandatangani CEDAW pada 30 Juli 1980 yang kemudian baru diratifikasi pada 9 Juli 1993. Peratifikasian CEDAW diharapkan mampu untuk memberikan perubahan yang lebih baik terkait dengan penerapan hak asasi perempuan di India. Konvensi CEDAW menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan (*equality and equity*) yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan.

Konvensi CEDAW didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Persamaan Substantif, meliputi:
 - a. Langkah tindak untuk merealisasi hak-hak wanita yang ditujukan untuk mengatasi perbedaan, *disparitas* kesenjangan yang merugikan wanita.
 - b. Langkah tindak untuk melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai akses

yang sama dengan pria yaitu kesamaan menikmati manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada.

- c. Mewajibkan negara untuk mendasarkan kebijakan dan langkah tindak dengan prinsip persamaan kesempatan, menikmati hasil dan manfaat secara adil, kesamaan di muka hukum, kewarganegaraan dan keluarga.

2. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan, apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk menghapus penikmatan dan penggunaan HAM dan kebebasan pokok di bidang politik, sosial, budaya, atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

3. Prinsip Kewajiban Negara

Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya.
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dan hak-hak itu dan menciptakan aturan yang kondusif untuk meningkatkan akses wanita pada setiap peluang yang ada.
- c. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak wanita.

¹³ Ridwan, M. *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis* (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto bekerjasama dengan Penerbit Fajar Pustaka Yogyakarta, 2006), 35-37

- d. Negara tidak saja menjamin *de-jure* tetapi juga secara *de-facto*.

- e. Negara tidak saja mengatur sector public, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan Lembaga di sector keluarga dan swasta.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM dan Diskriminasi

Akses Keadilan, Konstitusi memiliki makna sosial dan fungsi yang besar pada masyarakat. Peraturan membawa perubahan positif dengan cara memberi peluang dan kekuatan bagi perempuan Dalit untuk melawan penindasan. Terdapat beberapa undang-undang yang dibentuk khusus untuk memfasilitasi kelompok minoritas, yakni: *Protection of Civil Rights Act (PCR)* dan *Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act* (disebut dengan *Prevention of Atrocities* selanjutnya disebut dengan POA). Banyak kasus justru aturan tersebut sangat sulit dijangkau oleh masyarakat yang ingin menuntut keadilan. Banyak laporan yang menyatakan bahwa otoritas penegak hukum justru menghalangi masyarakat untuk melapor. Menurut *Scheduled Caste & Scheduled Tribes Act Report Card*¹⁴, terdapat beberapa hal yang menyebabkan banyak kasus yang akhirnya enggan untuk dilaporkan masyarakat:

1. Aparat bersifat apatis dan menghalangi pendaftaran kasus.
2. Adanya tekanan pada polisi untuk menjaga agar kejahatan yang dilaporkan tetap rendah

¹⁴ NCSPA. 2010. *20 Years Scheduled Caste & Scheduled Tribes Act Report Card*. National Coalition for Strengthening SCs & STs (PoA) Act. New Delhi

- di wilayah yurisdiksinya.
3. Investigasi yang lambat dan rendahnya tingkat hukuman.
 4. Aparat mengajukan *false case*, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap korban agar bungkam.
 5. Korupsi antar aparat dan bias kasta.
 6. Menyatakan terdakwa tidak bersalah tanpa melalui proses hukum yang berkeadilan.

Data diatas menunjukkan bahwa alasan utama keraguan masyarakat adalah aparat penegak hukumnya sendiri. Masyarakat mengetahui bahwa polisi, dewan desa, aparat pemerintah mendukung sistem kasta¹⁵, antusiasme Perempuan Dalit untuk mendapat keadilan amatlah tinggi ini kurang ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum.

Terbukti dari peningkatan data pada tahun 2009-2018 menunjukkan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan menunggu penyelidikan polisi meningkat tajam 167,43% dari 6.095 kasus pada 2009 menjadi 16.300 pada tahun 2018.¹⁶ Tidak cakupnya aparat menangani masalah diskriminasi secara serius terlihat dari cara penanganan kasus yang terjadi pada perempuan Dalit.

Kasus yang seharusnya dijerat UU POA justru di registrasikan dengan undang-undang lain yang menyebabkan kompensasi dan berat

hukuman yang diterima menjadi lebih ringan, penggunaan UU yang tidak tepat akan mempengaruhi derajat keseriusan dari sebuah kasus.¹⁷ Ini menunjukkan kegagalan aparat dalam meregistrasikan kasus dengan benar.

Akses Kebutuhan Dasar, Manusia harus memenuhi kebutuhan fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan. Kelompok minoritas termasuk Dalit kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sebab Dalit kerap ditempatkan pada pekerjaan kasar yang bernilai upah rendah. Dipengaruhi oleh akses terhadap layanan sosial – Pendidikan dan kesehatan, serta akses kepemilikan tanah dan modal yang terbatas.¹⁸ Pendapatan ekonomi rendah berimbas pada kurangnya pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan.

Persepsi sosial bahwa Dalit merupakan orang-orang yang kotor, turut mendorong terjadinya pemisahan sumber air, tempat makan, hingga penampungan umum yang harus disesuaikan dengan status kasta.

Akses Pendidikan, Pendidikan memainkan peran penting dalam transmisi pengalaman sosial seperti budaya, pengetahuan, bahasam kepercayaan, dan lain-lain. Pengalaman sosial yang diterima di sekolah India berbeda-beda tiap

¹⁵ Mayell, H. 2003. India's "Untouchables" Face Violence, Discrimination. National Geographic. 3 Juni, dilihat 23 Desember 2022.

<https://www.nationalgeographic.com/pages/article/indias-untouchables-face-violence-discrimination>

¹⁶ National Dalit Movement for Justice, 2020. *Quest for Justice*. National Dalit Movement for Justice. New Delhi

¹⁷ Center for Human Rights and Global Justice & Human Right Watch. 2007. India's Fifteenth To Nineteenth Periodic Reports : "Caste Discrimination Against Dalits or So Called Untouchable in India", Center for Human Rights and Global Justice and Human Rights Watch. New York.

¹⁸ ILO. 2008. Dalits And Employment In The Private Sector In India, dilihat 3 Februari 2023. https://idsn.org/uploads/media/Summary_IL O_Dalit_Employment_Guid e.pdf

kelompoknya, hal tersebut disesuaikan dengan kondisi material serta status sosialnya. Pemerintah India menempatkan sekolah sebagai agen dari transformasi sosial, pada saat yang sama melupakan fakta bahwa dalam pelaksanaannya lembaga ini tidak menanamkan nilai-nilai egaliter. Sehingga dalam pelaksanaan sistem pendidikan dasar dan pendidikan tinggi di India masih melanggengkan praktik diskriminasi.

Kasus diskriminasi terhadap anak dan remaja Dalit di sekolah sangat banyak terjadi, terkhusus anak perempuan Dalit. Beberapa yang berhasil terliput oleh media diantaranya: Beberapa anak sekolah jatuh sakit setelah diminta membersihkan *septic tank* di sekolah negeri Rameswaram, seorang siswi di cap sebagai penyihir dan dikeluarkan dari sekolah,¹⁹ Tindakan diskriminatif terlihat dari adanya perbedaan perlakuan, seperti pada pengaturan tempat duduk, pelayanan saat makan siang, penundaan beasiswa, dipermalukan, dan guru yang tidak peka akan adanya penindasan. Sesuai laporan *Ministry of Human Resource Development* 2016, angka putus sekolah di kalangan perempuan Dalit pada 2013-2014 setinggi 18.32% di tingkat Pendidikan menengah. Laporan UNICEF pada tahun 2011 menemukan bahwa 51% anak Dalit putus sekolah dasar. Jumlahnya naik menjadi 67% yang mengejutkan di antara anak perempuan Dalit. Jumlah mencapai 37% di antar anak-anak non-Dalit dan non-Adivasi.

¹⁹ Pattanayak, N.C. 2014. Girl branded witch, thrown out of school. Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/girl-branded-witch-thrown-out-of-school/articleshow/28463052.cms?frmapp=yes&from=mdr> diakses 24 Maret 2023.

Tingginya angka putus sekolah di kalangan siswi Dalit di tingkat menengah pada akhirnya menyebabkan lebih sedikit pendaftaran di Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi.

Penurunan rasio partisipasi siswi Dalit di semua tingkat Pendidikan menunjukkan status Pendidikan yang mengkhawatirkan dan membuka mata di kalangan siswi Dalit di India. Ada kesenjangan gender dalam mengakses Pendidikan di negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki di sekolah dasar, menengah dan menengah atas terutama di Pendidikan tinggi. Hal ini menambah diskriminasi sosial perempuan Dalit dalam mengakses Pendidikan seperti yang terlihat jika dibandingkan dengan rasio partisipasi laki-laki Dalit dan perempuan kasta dominan.

Perbudakan, Eksploitasi dan Pekerjaan, interseksionalitas kasta, patriarki, dan kelas, membuat perempuan Dalit menjadi korban tiga kali lipat penindasan. Perempuan Dalit ditindas oleh orang-orang dari kasta dominan karena adalah Dalit, oleh orang kaya dan karena miskin, dan menghadapi penindasan patriarkial dari laki-laki dari semua komunitas termasuk kaum Dalit sendiri karena perempuan. Perempuan Dalit menjadi subjek kekerasan di tangan kasta dominan dan perempuan kelas, menjadikan perempuan Dalit bagian masyarakat yang sangat rentan dan sasaran empuk untuk dieksploitasi.

Berada di posisi paling bawah dalam struktur kekuasaan India, perempuan Dalit dirampas perkembangannya dan dipaksa untuk terlibat dalam pekerjaan kasar dan dibayar lebih rendah daripada rekan

laki-laki. Perempuan Dalit secara historis menghadapi berbagai diskriminasi dan kekerasan berdasarkan pekerjaan berbasis kasta seperti sistem Devadasi, *Bonded labour*, *manual scavenging*, dan lain-lain.

Kaitan antara tiga kali lipat penindasan terhadap perempuan Dalit dan prostitusi paksa terlihat jelas dalam sistem ‘Devadasi’ dan ‘Jogini’ yang dipraktikkan di India dan masih ada meskipun telah dihapuskan. Devadasi adalah praktik keagamaan dan lembaga India, anak perempuan dipersembahkan kepada dewa Hindu. Menjadi seorang Dalit adalah semacam “prasyarat” untuk menjadi seorang Devadasi. Gadis-gadis muda yang dipaksa masuk ke dalam sistem devadasi dibiarkan berjuang sendiri. Tidak ada dukungan ekonomi dan sosial yang ditawarkan kepada gadis-gadis ini oleh kuil atau orang tua. Usaha mempertahankan mata pencaharian, perempuan Dalit bekerja sebagai pekerja seks komersial, pengemis atau penari di acara-acara budaya dan keagamaan.

Kejahatan Terhadap Perempuan Dalit, Perempuan Dalit harus menerima kenyataan bahwa menempati urutan terbawah sistem kasta sekaligus dalam hierarki gender. Orientasi patriarkal yang dijunjung di India menjadi alasan utama meluasnya kekerasan terhadap perempuan.

National Crime Records Bureau (NCRB) telah mencatat 251.068 Insiden kejahatan terhadap perempuan Dalit. Kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan Dalit merupakan 15,11% (38.038 insiden) dari total kejahatan terhadap Dalit dari 2014-2019. Kejahatan terhadap perempuan dan anak

perempuan Dalit telah meningkat secara signifikan sebesar 45.9% dari 2014-2019. Pada 2014, kejahatan terhadap perempuan Dalit merupakan 12.77% (5.149 insiden) dari total 40,300 insiden yang tercatat. Tahun 2019, 16.35% (7.510 insiden) dari total 45.922 total insiden yang tercatat.

Selanjutnya data NCRB dari tahun 2014-2019 mengungkapkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun dalam insiden kejahatan yang dilaporkan terhadap perempuan Dalit. Terjadi peningkatan insiden pemerkosaan sebesar 56,11% terhadap perempuan dan anak Dalit dari tahun 2014 (2,233 insiden) hingga tahun 2019 (3,468 insiden) dengan total 16,236 insiden pemerkosaan yang dilaporkan. Dalam kasus percobaan pemerkosaan 670 insiden tercatat dari 2019 hingga 2014, dengan peningkatan 15.46% dari 2014 (87 insiden) hingga 2019 (124 insiden). Penyerangan terhadap perempuan Dalit dengan niat untuk menghina kesopanan meningkat 43,9%, dengan total 17.687 insiden yang dilaporkan. Serangan terhadap perempuan Dalit dan anak perempuan Dalit dengan niat menghina kesopanan, pelecehan seksual, ditelanjangi, voyeurism, dan penguntit. Penghinaan terhadap perempuan mengalami tiga kali lipat sebesar 155,4% pada tahun 2019 (143 insiden) dibandingkan tahun 2014 (56 insiden), dengan total 558 insiden dilaporkan.

Peran Pemerintah India Dalam Penyelesaian Konflik Diskriminasi

Konstitusi India pada pasal 17 melarang adanya praktik “*untouchability*” dalam hal apapun. Pada tahun 1955, diberlakukan UU

kejahatan yang mengkriminalisasi praktik-praktik *untouchability* dan segala kecacatan sosial yang ditimbulkan dari praktik tersebut, hingga pada tahun 1976 UU tersebut diubah dan dinamai dengan *Protection of Civil Rights Act* (PCR) atau UU Perlindungan Hak Sipil.

Dari tahun ke tahun, ketentuan dalam PCR dan *Indian Penal Code* (KUHP India, selanjutnya disebut IPC) dinyatakan kurang memadai dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap yakni *Scheduled Castes* (SC) dan *Scheduled Tribes* (ST). Kedua istilah tersebut digunakan dalam konstitusi India, *Scheduled Caste* merujuk kepada komunitas kasta atau kesukuan/suku yang termuat dalam UU atau lebih dikenal dengan sebutan *Adivasis*. Ada pula sebutan bagi kelompok terbelakang lainnya atau *Other Backward Class* (OBC)

Atas dasar penilaian tidak efektifnya PCR, maka pada tahun 1989 parlemen India memberlakukan *Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act (Prevention of Atrocities)*, selanjutnya disebut dengan POA). Dalam UU POA memperkenalkan jenis kejahatan baru, yaitu '*atrocities*' yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan berasal dari SC & ST, serta memiliki peradilan khusus serta rehabilitasi bagi para korban. Dibentuknya POA dirasa kurang mampu memberikan akses keadilan yang baik, karena masih adanya perlakuan diskriminatif.

Pemerintah membentuk undang-undang lain yang melindungi hak-hak kelompok Dalit dan minoritas lainnya. Seperti *Rights to Education* (RTE) yakni UU dalam bidang Pendidikan yang memberikan akses Pendidikan gratis bagi anak usia 6-14. UU yang mengatur sistem

reservasi dan kuota bagi kelompok minoritas di ranah Pendidikan tinggi dan pemerintahan. Dalam ranah ketenagakerjaan terdapat *Bonded Labour Sistem (Abolition) Act* yang melarang adanya kerja paksa dan kerja terikat.

India membentuk *The Ministry of Women and Child Development* yang dulunya merupakan bagian dari *The Ministry of Human Resources Development* pada 30 Januari 2006. Tujuan utama dari *The Ministry of Women and Child Development* adalah memberdayakan para perempuan di India agar terbebas dari perlakuan diskriminatif, menyadarkan para perempuan akan hak-hak yang dimilikinya dan memberdayakan perempuan secara social dan ekonomi. *The Ministry of Women and Child Development* memiliki program yang mendukung tujuan utamanya, yang mana salah satunya yaitu *Swadhar Greh Scheme*.

Indikator Kegagalan India Menerapkan Prinsip CEDAW

A. Tingkat Kolaborasi (*Level of Collaboration*)

Dari pengukuran *output*, *outcome*, dan *impact*, teori efektifitas rezim dari Arild Underdal memberikan penilaian tingkat kolaborasi skala ordinal. Ada 6 skala ordinal untuk mengukur tingkat kolaborasi rezim. Dapat dilihat bahwa pada intinya tingkatan kolaborasi terdiri dari beberapa langkah, **skala 0**, gagasan bersama dimana India sudah meratifikasi CEDAW yang merupakan instrument perjanjian internasional. **Skala 1**, koordinasi tindakan dengan pemahaman yang dilakukan secara samar-samar. **Skala 2**, rumusan aturan secara eksplisit, India sudah

membuat kebijakan dengan pengadopsian CEDAW pada hukum nasionalnya. **Skala 3**, penilaian secara terpusat, India wajib membuat laporan setiap 4 tahun mengenai kondisi di negara nya kepada CEDAW tetapi laporan ini hanya bersifat formal tanpa ada aksi nyata. **Skala 4**, implementasi pada tingkat nasional, dalam hal ini India terbukti gagal dalam penerapan prinsip-prinsip CEDAW pada tingkat nasional, dengan masih meningkatnya kasus diskriminasi terhadap perempuan Dalit setiap tahunnya. **Skala 5**, koordinasi terencana dan integrasi antara perencana dan implementasi, tidak ada koordinasi terencana dan integrasi antara CEDAW dan India terhadap regulasi yang baik untuk kasus diskriminasi terhadap perempuan Dalit. India hanya mampu mencapai pada tingkat skala 2, pada skala 3-5 India gagal dalam melaksanakannya.

b. Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)

Problem malignancy, dalam penelitian ini kasus diskriminasi terhadap perempuan Dalit merupakan isu yang sensitif terlebih India sudah meratifikasi konvensi CEDAW yang isi perjanjiannya bertentangan dengan kasus diskriminasi yang terjadi di India. Sistem kasta yang masih mengakar dalam sistem sosial dan budaya di India menjadikan masalah diskriminasi terhadap perempuan Dalit menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Hal ini bisa dikatakan merupakan isu yang bersifat *malign*.

Di India sendiri terdapat perbedaan (*Incongruity*) pandangan tentang mendesaknya kasus diskriminasi kasta dan gender yang terjadi, lebih tepatnya dalam

tingkatan bahaya itu sendiri karena besarnya ancaman dan kerugian yang diakibatkan oleh kasus diskriminasi berbeda dampaknya pada tiap-tiap actor, baik pemerintah maupun masyarakat sipil.

Kepentingan nasional India juga memberikan pengaruh (*Assymetry*) tergantung apa yang dianggap menguntungkan atau merugikan. *Asymmetry* dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak seimbang bahkan bisa bersifat negatif antara aktor anggota sebuah rezim yang dikarenakan oleh kepentingan yang berbeda-beda. Dari indikator tersebut ditambah sikap ketidakpedulian dan acuh tak acuh dapat menyebabkan perpecahan (*Cummulative Cleavages*) yang pada akhirnya berujung pada tidak efektifnya rezim.

c. Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Capacity*)

Problem solving capacity, dalam kapasitas penyelesaian masalah dapat dilihat dari *institutional setting*, *distribution of power*, dan *skill and energy* suatu negara. Seperangkat aturan permainan yang mempunyai fungsi untuk mendefinisikan praktik social, menetapkan peran kepada anggota rezim, serta membimbing interaksi diantara anggota yang mempunyai peran. Dengan kata lain *Institutional Setting* dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mengatur perilaku pada salah satu anggota rezim dengan anggota rezim yang lainnya. Efektivitas sebuah rezim internasional juga dapat dilihat dari bagaimana aturan yang terdapat didalam permainan yang mengatur sebuah rezim tersebut.

Distribution of Power atau distribusi kekuasaan antar aktor yang terlibat didalam sebuah rezim

internasional. Dalam permasalahan penerapan prinsip CEDAW oleh India terhadap kasus perempuan Dalit tidak memiliki *benevolent hegemon* dan *cohesive hegemony* pada kedua aktor ini, dikarenakan tidak ada solusi tegas dari CEDAW untuk sama-sama melakukan penegakan terhadap pelaku diskriminasi, sedangkan jika dilihat India juga tidak memiliki kapasitas dari negaranya untuk dapat mengontrol keadaan negara dalam permasalahan kasus ini dengan serius.

Suatu rezim internasional membutuhkan *skill and energy* dalam menangani permasalahan yang menjadi fokus dalam rezim tersebut. Kapasitas India sebagai negara yang dirasa belum maksimal untuk mengurangi diskriminasi perempuan dalam pengadaan sarana dan prasarana dalam kasus diskriminasi Dalit, dan kurangnya 'kepastian hukum' memberdayakan pelaku kasta atas dan menciptakan ketidakamanan di antara Dalit. Pemerintah kurang konsisten dalam menjaga dan mengawasi kasus diskriminasi terhadap perempuan.

Faktor-Faktor Kegagalan India Menerapkan Prinsip CEDAW

Faktor sosial, karena hubungan sosial yang hierarkis sudah mengakar dalam masyarakat India. Sehingga perempuan Dalit harus menanggung tiga beban, yaitu kasta, gender, dan kemiskinan. Dan perempuan Dalit tunduk pada sistem patriarki.

Faktor budaya, perempuan Dalit dilarang belajar dan berbicara menggunakan Bahasa Sansekerta, sehingga perempuan Dalit tidak bisa mengucapkan mantra veda yang bisa menghapus dosa maka perempuan Dalit dianggap sama najisnya dengan

ketidakbenaran. Perempuan Dalit menjadi korban praktik yang menjijikkan seperti *devadasi/jogini* (pelacuran di kuil).

Faktor ekonomi, diskriminasi terhadap perempuan Dalit dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang lemah, kemiskinan yang ekstrem memaksa untuk bekerja sebagai buruh tani di ladang milik kasta atas, sementara kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum yang menyebabkan perempuan Dalit selalu mentoleransi segala bentuk kekerasan yang terjadi pada.

Faktor hukum, dalam penegakan hukum terhadap kasus diskriminasi perempuan Dalit, India sudah mengeluarkan undang-undang dan peraturan sebagai usaha penerapan prinsip CEDAW. Dalam penerapan undang-undang tersebut tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang adil, aparat penegak hukum mendukung adanya sistem kasta. Sehingga dalam menanggapi kasus diskriminasi terhadap perempuan Dalit aparat bersikap apatis dan banyak laporan yang tidak didaftarkan dan ditanggihkan sehingga banyak kasus yang tidak terselesaikan dan memberikan ketidakadilan dan merugikan perempuan Dalit khususnya.

SIMPULAN

Perempuan Dalit mengalami diskriminasi yang bersumber dari ketidaksetaraan gender dan diskriminasi kasta. Sebagai bagian dari kasta rendah sekaligus kelompok minoritas di India, perempuan Dalit menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan perempuan non-Dalit maupun masyarakat India pada umumnya. Interseksi antara diskriminasi

berbasis kasta dan ketidaksetaraan gender menjadi penyebab atas terhalangnya perempuan Dalit untuk memperoleh hak-hak sipil.

Segregasi kasta mendominasi dalam hal tempat tinggal, perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan interaksi sosial yang diperkuat melalui praktik dan ancaman pengucilan sosial, boikot ekonomi, dan kekerasan fisik. Diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan Dalit ditemukan dalam banyak bentuk yaitu aspek keadilan, aspek kebutuhan dasar, aspek pendidikan, perbudakan, eksploitasi, pekerjaan, dan kejahatan terhadap perempuan Dalit.

India menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan yang harus diakui dan dijamin perlindungannya maka, India telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada tahun 1993 yang merupakan salah satu instrument perjanjian internasional yang mengatur tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam peratifikasiannya India belum melakukan upaya yang sempurna untuk benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW. Terlebih lagi, dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi India untuk mengakui system kasta sebagai permasalahan urgent yang merugikan beberapa kelompok masyarakat.

Pengukuran indikator kegagalan menggunakan teori efektifitas rezim dari Arild Underdal memberikan penilaian melalui Tingkat Kolaborasi (*Level of Collaboration*), Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*), Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem*

Solving Capacity). Pada tingkat kolaborasi terdapat skala ordinal. Dari 6 skala, India hanya mampu mencapai pada tingkat skala 0-2, pada skala 3-5 India gagal dalam melaksanakannya.

Melalui indikator kegagalan, terdapat faktor penyebab india gagal dalam menerapkan prinsip CEDAW pada kasus diskriminasi terhadap perempuan kasta Dalit, yaitu faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor hukum. Ini membuktikan bahwa India tidak kekurangan hukum tetapi tidak bisa mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AIDMAM, All India Dalit Mahila Adhikar Manch. 2021. *Dalit Women Rise For Justice*. New Delhi: All India Dalit Mahila Adhikar Manch (AIDMAM)-NCDHR.
- Cresswell, John W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition*. California: SAGE Publications
- Ridwan, M. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto bekerjasama dengan Penerbit Fajar Pustaka Yogyakarta
- Rourke, John T. 1995. *International Politics on the World Stage, 5th ed.*, Connecticut: Dushking Publishing Group
- Shah, Ghanshyam. 2006. *Untouchability in Rural India*. New Delhi: Thousand Oaks

Underdal, Arild. 2002. *Explaining Regime Effectiveness*, Press Universitas Oslo: Norwegia.

Artikel Jurnal

Olivia, Yessi. 2013. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional*. Vol 5. No. 1: 890-970

Dokumen

Center for Human Rights and Global Justice & Human Right Watch. 2007. India's Fifteenth To Nineteenth Periodic Reports : "Caste Discrimination Against Dalits or So Called Untouchable in India", Center for Human Rights and Global Justice and Human Rights Watch. New York.

Census of India. 2011. Provisional Population Totals. Paper 2, Volume 1 of 2011.
http://censusindia.gov.in/2011provresults/paper2/data_files/india/paper2.

Human Rights Watch. 2001. Caste Discrimination : A Global Concern. United Nation, South Africa

IDSN. 2014b. URGENT APPEAL: Reprisals against IDSN by the Government of India in trying to formalize its association with the UN and obtain ECOSOC Status. http://idsn.org/wpcontent/uploads/pdfs/UrgentAppeal/UrgentAppeal_IDSNI_October2014.pdf diakses 30 Oktober 2022.

ILO. 2008. Dalits And Employment in The Private Sector In India. <https://idsn.org/uploads/media/SummaryILODalitEmploymentGuide.pdf> diakses 8 Februari 2023

NCSPA. 2010. *20 Years Scheduled Caste & Scheduled Tribes Act Report Card*. National Coalition for Strengthening SCs & STs (PoA) Act. New Delhi

National Dalit Movement for Justice, 2020. *Quest for Justice*. National Dalit Movement for Justice: New Delhi

Website

Goldsmith, Belinda, Meka Beresford. 2018 "India Most Dangerous Country For Women With Sexual Violence Rife _ Global Poll"
<https://www.reuters.com/article/women-dangerous-poll-idINKBN1JM076> diakses pada 10 Mei 2022

Mayell, H. 2003. *India's "Untouchables" Face Violence, Discrimination*.
<https://www.nationalgeographic.com/pages/article/indias-untouchables-face-violence-discrimination> diakses 10 Maret 2023

Nindhi Sadana Sabharwal dan Wandana Sonalkar. "Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste",
<http://www.theglobaljusticenetwork.org/global2441/index.php/gjn/article/download/54/85> diakses pada 15 Mei 2022

Pattanayak, N.C. 2014. Girl branded witch, thrown out of school. Times of India.
<https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/girl-branded-witch-thrown-out-of-school/articleshow/28463052.cms?frmapp=yes&from=mdr> diakses 24 Maret 2023